

PE.09.03/LAP-6/D405/2023

9 JANUARI 2023



Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa Tahun 2022



Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan



KATA PENGANTAR

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang Akuntan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara yang mempunyai tugas membantu Deputi Kepala BPKP mengelola dan membina kegiatan pengawasan *intern* pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam Tahun 2022 berbagai penugasan pengawasan telah dilaksanakan dengan cepat dan cermat. Secara keseluruhan, capaian sasaran program adalah sebesar 110,80%, dengan rincian pada bagian laporan ini.

Demikian laporan ini secara ringkas kami sampaikan. Uraian rinci dapat dilihat pada badan laporan.

Jakarta, 9 Januari 2023
Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Indra Khaira Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara.

Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas membantu Deputi Kepala BPKP mengelola dan membina kegiatan pengawasan *intern* pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian *Intern* pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
2. Perencanaan pengawasan *intern*, analisis evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa;
3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan *intern* dan pemberian bimbingan teknis pengawasan *intern* pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa;
4. Pelaksanaan pengawasan *intern* pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa;
5. Pelaksanaan pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa yang di dalamnya terdapat

- kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa;
 7. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa;
 8. Pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa;
 9. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa.

B. Struktur Organisasi

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa terdiri atas:

1. Subdirektorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Air dan Sanitasi; dan
3. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa.

Subdirektorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan lintas sektoral, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis pada badan layanan umum dan badan layanan umum daerah serta penyelenggaraan sistem pengendalian *intern*.

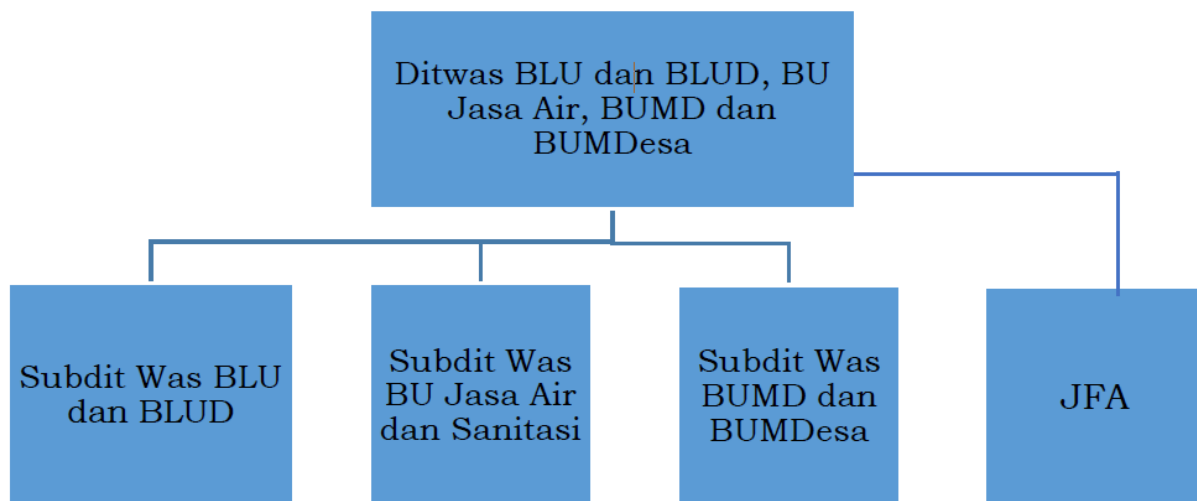
Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Air dan Sanitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan,

penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan lintas sektoral, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis pada badan usaha dan badan lainnya di bidang Jasa Air dan Sanitasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian *intern*.

Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha dan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan lintas sektoral, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis pada badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Struktur organisasi pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi



Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2022 berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 – SDM Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai Tahun 2022
1	Struktural	1
2	Auditor	22
3	Auditor Madya	8
4	Auditor Muda	6
5	Auditor Pertama	2
6	Auditor Penyelia	4
7	Calon Auditor Pelaksana	2
8	Sekretaris	1
9	Arsiparis	1
10	Pranata Komputer	1
11	Pengadministrasi Umum	1
Jumlah		27

Anggaran dan Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.969.574.904 atau 99,68% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.975.855.000. Rencana dan realisasi penggunaan SDM serta anggaran tahun 2022 disajikan pada Lampiran 1.

C. Aspek Strategis

Deputi Bidang Akuntan Negara telah membuat metodologi pengukuran akuntabilitas badan usaha (korporasi), yang menggabungkan lima dimensi untuk diukur akuntabilitasnya menjadi satu nilai akuntabilitas korporasi, yaitu Dimensi 1: Dukungan korporasi pada pembangunan, Dimensi 2: Dukungan korporasi pada keuangan negara, Dimensi 3: Kepatuhan dan efektivitas operasional, Dimensi 4: Efektivitas sistem tata kelola korporasi, dan Dimensi 5: Efektivitas pengendalian fraud. Dimensi 1 dan Dimensi 2 merupakan result indicators, sedangkan Dimensi 3 s.d. 5 merupakan leading indicators. Indikator ini selanjutnya dinamakan Indonesian Corporation Accountability Index (ICORPAX)

ICORPAX yang dibuat oleh Deputi Bidang Akuntan Negara berfokus pada penilaian kontribusi fiskal dan kontribusi pembangunan, sebagai result indicators. Parameter pengukuran kinerja yang selama ini telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara, seperti penilaian kinerja, penilaian atas penerapan GCG, dan penilaian atas penerapan manajemen risiko, akan dimasukkan dalam dua dimensi

penilaian, yaitu penilaian atas kepatuhan dan efektivitas operasional serta penilaian efektivitas sistem tata kelola korporasi.

Dengan demikian, tercapainya target strategis Deputi Bidang Akuntan Negara juga akan mendukung pencapaian target strategis Kementerian BUMN.

D. Kegiatan dan Layanan Produk

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan kinerja korporasi dalam pencapaian program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan;
2. Mendukung peningkatan kinerja korporasi dalam mencapai target yang ditetapkan, dengan berlandaskan manajemen risiko; dan
3. Membantu meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan mendorong kinerja BUMN melalui capaian skor Good Corporate Governance (GCG) minimal baik, kinerja BUMN minimal A (Baik) dan BUMN dengan kinerja berpredikat baik.

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa memberikan layanan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1) kegiatan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit, reviu, evaluasi dan pemantauan; serta 2) kegiatan konsultasi (consulting) meliputi kegiatan bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

1. Pemberian Keyakinan (Assurance)

Kegiatan assurance bertujuan memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan pemberian keyakinan antara lain meliputi:

- **Reviu:** penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- **Evaluasi:** serangkaian kegiatan membandingkan hasil/capaian suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- **Pemantauan:** proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Konsultasi (Consulting)

Kegiatan konsultasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Kegiatan konsultasi meliputi:

- **Bimbingan Teknis:** kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- **Asistensi:** kegiatan membantu korporasi dalam rangka memperlancar tugas dan memberikan nilai tambah bagi korporasi.
- **Sosialisasi:** proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran informasi.

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa telah menghasilkan produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen BUMD/BLU/BLUD/BUMDes. Selain produk BPKP untuk pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa telah menghasilkan produk unggulan, antara lain:

1. Program Pengembangan Good Corporate Governance di BUMN dan BUMD;
2. Sistem Informasi Akuntansi PDAM;
3. Sistem Informasi Akuntansi BLUD;
4. Program Pembinaan dan Pengawasan BUM Desa, serta Pengembangan;
5. Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa.

E. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini disusun untuk tujuan mengomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, sistematika penyajian adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan yang memuat tugas, fungsi dan wewenang Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa, aspek strategis, kegiatan dan layanan produk, struktur organisasi, serta sistematika penyajian.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan Rencana Kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2021.
Rencana strategis memuat penjelasan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan capaian dan analisis kinerja setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa, realisasi anggaran yang digunakan mendukung kegiatan, dan hasil survei kepuasan mitra.
- Bab IV Penutup, menguraikan ringkasan capaian tujuan, sasaran kegiatan, hambatan pencapaian sasaran dan upaya perbaikan kinerja, serta pencapaian dan peningkatan kinerja periode mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024

1. Rencana Strategis

Rencana Kerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Deputi Akuntan Negara sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024. BPKP memiliki dua tujuan yang akan diwujudkan dalam periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat

Tujuan pertama merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh BPKP pada akhir periode Rencana Strategis pada tahun 2024, sebagai penjabaran dari mandat BPKP sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan kedua dimaksudkan untuk memastikan bahwa BPKP dapat mencapai target kinerja sebagaimana diinginkan dalam tujuan pertama dapat terwujud secara optimal.

Dalam periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa memiliki tanggung jawab atas pencapaian 3 Sasaran Strategis dan 5 Sasaran Program Pengawasan.

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Tujuan 1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional
-----------------	--

Tujuan pertama adalah “Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Tujuan ini dijabarkan dalam lima sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau pencapaian outcome program yang diselenggarakan.

Kelima sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah.

2. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional.
3. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha.
4. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi.
5. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian K/L/Pemda/BU.

Dari kelima sasaran strategis tersebut, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa akan berkontribusi pada tiga sasaran strategis, yaitu Sasaran Strategis 1, 2, dan 5.

Target masing-masing sasaran strategis yang terkait dengan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa untuk tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah		
1.1	Indikator 1.1 Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	1
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional		
2.1	Indikator 2.1 Jumlah PSN yang Tercapai sesuai Target	Jumlah	1
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian K/L/Pemda/BU		
5.1	Indikator 5.1 Jumlah BUMN dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3	Jumlah	1
5.2	Indikator 5.2 Jumlah BUMD dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3	Jumlah	329
5.3	Indikator 5.3 Jumlah BLU/BLUD dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3	Jumlah	106

2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung pencapaian target Sasaran Strategis pada Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2020-2024, sasaran program pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis 1 didukung oleh Sasaran Program 1: Meningkatnya pengawasan pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah.
- b. Sasaran Strategis 2 didukung oleh Sasaran Program 2: Meningkatnya dukungan Badan Usaha terhadap pembangunan nasional.
- c. Sasaran Strategis 3 didukung oleh dua Sasaran Program yaitu:
 - Sasaran Program 3: Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas operasional Badan Usaha.
 - Sasaran Program 4: Meningkatnya kualitas tata kelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD.
- d. Sasaran Strategis 5 didukung oleh Sasaran Program 5: Meningkatnya kualitas pengendalian intern Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha.
- e. Sasaran Strategis 6 didukung oleh Sasaran Program 6: Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan Deputi Bidang Akuntan Negara.

Ketercapaian sasaran program akan diukur melalui 17 indikator kinerja program sebagaimana tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
1	Meningkatnya pengawasan pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1	Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat
2	Meningkatnya dukungan Badan Usaha terhadap pembangunan nasional	2.1	Jumlah PSN yang Tercapai sesuai Target
3	Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas operasional Badan Usaha	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
4	Meningkatnya kualitas tata kelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	4.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik
		4.2	Jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik
		4.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
		4.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat
		4.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu menyusun laporan keuangan
		4.6	Jumlah BUM Desa yang berkontribusi kepada perekonomian desa
5	Meningkatnya kualitas pengendalian intern Kementerian/Lembaga/ Badan Usaha	5.1	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3
		5.2	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3
		5.3	Jumlah BLU/BLUD dengan MRI \geq Level 3
		5.4	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
		5.5	Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3
		5.6	Jumlah BLU/BLUD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3
6	Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan Deputy Bidang Akuntan Negara	6.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan
		6.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam tahun 2022, Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa mengalami perubahan dan tidak bisa mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Deputy Bidang Akuntan Negara untuk tahun 2020-2024 disebabkan adanya penambahan indikator kinerja program dan pendistribusian target kinerja pada beberapa kategori badan usaha.

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Akuntan Negara Tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6 – Perjanjian Kinerja Tahun 2022

1	SASARAN KEGIATAN	2	Target		
			3	4	
			Satuan	Jumlah	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah	1.1	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	1
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	1
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	0
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha	4.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	1
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD	5.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	1
		5.2	Jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	13
		5.3	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	Jumlah	234
		5.4	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	Jumlah	78
		5.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan	Jumlah	1935
		5.6	Jumlah BUMDes yang Berkontribusi Kepada Perekonomian Desa	Jumlah	103
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha	6.1	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	1
		6.2	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	329
		6.3	Jumlah BLU/BLUD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	106
		6.4	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	1
		6.5	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	10
		6.6	Jumlah BLU/BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	14
7	Meningkatnya Kualitas layanan Deputy Bidang Akuntan Negara	7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	75
		7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1
8	Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputy Akuntan Negara	8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70
		8.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari komponen perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pengukuran kinerja pada tahun 2022 dilakukan pada 6 sasaran program pengawasan dan 2 sasaran program layanan ketatausahaan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Pengukuran 6 sasaran program ini dilakukan dengan menggunakan 16 indikator kinerja sedang sasaran program layanan ketatausahaan Deputi Akuntan Negara menggunakan 4 indikator kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa merupakan capaian kinerja unit di lingkungan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa dan Perwakilan BPKP. Uraian capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

1. Capaian Target Sasaran Strategis

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa mendukung capaian sasaran strategis BPKP. Secara rata-

rata capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa yang mendukung sasaran strategis BPKP untuk tahun 2022 adalah sebesar 122,37%. Dukungan kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa terhadap sasaran strategis BPKP tahun 2022 adalah pada capaian Sasaran Strategis 1: meningkatnya akuntabilitas keuangan negara dan daerah sebesar 100%, capaian Sasaran Strategis 2: meningkatnya akuntabilitas pembangunan nasional sebesar 200%, dan capaian Sasaran Strategis 5: meningkatnya kualitas pengendalian intern pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan badan usaha (K/L/Pemda/BU) sebesar 104,12%. Hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis BPKP tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.1.

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah					
1.1	Indikator 1.1 Jumlah Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	Jumlah	1	1	100	Mencapai Target
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pembangunan Nasional					
2.1	Indikator 2.1 Jumlah PSN yang Tercapai sesuai Target	Jumlah	1	2	200	Melebihi Target
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian K/L/Pemda/BU					
5.1	Indikator 5.1 Jumlah BUMN dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3	Jumlah	1	1	100	Mencapai Target
5.2	Indikator 5.2 Jumlah BUMD dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3	Jumlah	329	337	102,43	Melebihi Target

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi Capaian
5.3	Indikator 5.3 Jumlah BLU/BLUD dengan Indeks Manajemen Risiko \geq Level 3	Jumlah	106	116	109,43	Melebihi Target
					122,37	Melebihi Target

2. Capaian Target Sasaran Program

Rata-rata capaian sasaran program Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa tahun 2022 adalah sebesar 110,80%. Rata-rata capaian Program 1) meningkatnya pengawasan pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah sebesar 100,00%, 2) meningkatnya pengawasan pembangunan atas dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional sebesar 200,00%, 3) meningkatnya akuntabilitas badan usaha sebesar 100,00%, 4) meningkatnya kepatuhan dan efektivitas operasional badan usaha sebesar 100,00%, 5) meningkatnya kualitas tata kelola BUMN/D/BLUD sebesar 139,48%, 6) meningkatnya pengawasan pembangunan dan kualitas pengendalian intern pada K/L/Badan Usaha sebesar 117,42%, 7) Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara sebesar 164,32%, dan 8) Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara sebesar 121,42%. Hasil pengukuran capaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 – Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022 (%)	Realisasi TW 4 (%)	Capaian 2022 (%)
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah				
1.1	Jumlah BUMN dengan kinerja sehat	Jumlah	1	1	100,00
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional				
2.1	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	1	2	200,00
III	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha				
3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	0	0	100,00
IV	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha				
4.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	1	1	100,00
V	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD				
5.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	1	1	100,00
5.2	Jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	13	17	130,76
5.3	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	Jumlah	234	250	106,83
5.4	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	Jumlah	78	83	106,41
5.5	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mampu menyusun laporan keuangan	Jumlah	1,935	2.492	128,78

No	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022 (%)	Realisasi TW 4 (%)	Capaian 2022 (%)
5.6	Jumlah BUM Desa yang berkontribusi kepada perekonomian desa	Jumlah	103	272	264,07
VI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha				
6.1	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	1	1	100,00
6.2	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	329	337	102,43
6.3	Jumlah BLU/BLUD dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	106	116	109,43
6.4	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	1	1	100,00
6.5	Jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	11	19	172,27
6.6	Jumlah BLU/BLUD dengan kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	14	17	121,42
VII	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara				
7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks skala 100	75	96,49	128,65
7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	2	200,00

No	Sasaran Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022 (%)	Realisasi TW 4 (%)	Capaian 2022 (%)
VIII	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Akuntan Negara				
8.1	Persentase efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	100	142,85
8.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	100	100,00
Rata-Rata					110,80

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Akuntan Negara tahun 2022 dijabarkan dalam sasaran program Deputi Bidang Akuntan Negara sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	<p>Sasaran Strategis 1:</p> <p>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah</p>
---	---

Pencapaian Sasaran Strategis (sastra) 1 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu jumlah BUMN dengan kinerja sehat.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 1 adalah sebagai berikut:

1.1.
Jumlah
BUMN
dengan
kinerja
sehat

Jumlah BUMN dengan kinerja sehat, dari sisi kinerja keuangan, merupakan kondisi prasyarat bagi BUMN untuk dapat memberikan kontribusi secara fiskal kepada negara, karena untuk dapat memberikan kontribusi pajak (PPh Badan) dan menyetorkan dividen, suatu BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang sehat terlebih dahulu.

Indikator ini diukur menggunakan 5 dimensi ICORPAX, yaitu:

1. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan Nasional
2. Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara;
3. Dimensi Kepatuhan dan Efektivitas Operasional;
4. Dimensi Efektivitas Sistem Tata Kelola; dan
5. Dimensi Efektivitas Pengendalian *Fraud*.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada Tahun 2022 sebanyak 1 BUMN dengan Kinerja Sehat.

Per Triwulan IV Tahun 2022 telah dilakukan pengawasan terhadap 1 BUMN dengan hasil kinerja “Sehat” yakni Perusahaan Umum Jasa Tirta II. Dengan begitu capaian kinerja atas BUMN dengan kinerja sehat Tahun 2022 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan.

2

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Strategis (Sastra) 2 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu jumlah PSN yang tercapai sesuai target.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 2 adalah sebagai berikut:

2.1 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target

Jumlah PSN yang mencapai target adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh BUMN yang capaian fisik proyek mencapai atau melebihi target fisik pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan Proyek Strategis Nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PSN dengan progres fisik mencapai atau melebihi target fisik yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Target PSN pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 1 PSN SPAM.

Capaian jumlah PSN yang capaian progress fisik sesuai target sebanyak 2 PSN atau 200% dari target yang ditetapkan.

4

Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 4 yaitu Meningkatkan Kepatuhan dan Efektivitas Badan Usaha, ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator yaitu Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 4 adalah sebagai berikut:

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional dengan rincian parameter untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepatuhan (4%)
 - Permasalahan Hukum yang Dihadapi
 - Kepatuhan terhadap Regulasi Industri Tertentu
- b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (6%)
 - Keselarasan Program TJSL dengan Program prioritas pencapaian SDG's
 - Keberadaan Program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Share Value (CSV)* bagi perusahaan
 - Jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha
- c. Tingkat Kepuasan (6%)
 - Indeks Kepuasan Pelanggan
 - Indeks Kepuasan Vendor
 - *Employee Engagement*
- d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis (9%)
 - Pemenuhan *Service Level Agreement*
 - Penerapan *E-Procurement*
 - Keberadaan Inovasi

4.1
Jumlah
Badan
Usaha
dengan
Efektivitas
Operasional
Baik

- Penerapan Teknologi Informasi
 - Pengelolaan SDM
- e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset (5%)
- *Asset Management Policy*
 - *Asset Management Plans*
 - *Asset Portfolio*
 - ROA (*Return on Asset*)
 - *Fixed Assets Turnover*

Target kinerja Direktorat BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2022 sebanyak 1 badan usaha dengan efektivitas operasional “Baik”. Pada periode Triwulan IV Tahun 2022 telah dilakukan penilaian ICORPAX terhadap Perusahaan Umum Jasa Tirta I dengan capaian kinerja operasional “Baik”.

Sehingga capaian jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik adalah 100% (1/1) dari target yang ditetapkan.

5

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD, ditunjukkan dengan pencapaian 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik
2. Jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik
3. Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat
4. Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat
5. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan
6. Jumlah BUM Desa yang berkontribusi kepada perekonomian desa

5.1
Jumlah
BUMN
dengan tata
kelola
korporasi
baik

Uraian kinerja atas 6 indikator kinerja sastra 5 adalah sebagai berikut:

BUMN memiliki peran penting sebagai agen pembangunan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMN harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan perusahaan berjalan pada koridor yang seharusnya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi korporasi, khususnya BUMN agar menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang baik. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, BUMN diharuskan melakukan assessment terhadap tata kelola, memiliki *risk register* dan menerapkan pengendalian internal. Penilaian penerapan GCG ditujukan untuk memastikan efektivitas penerapan dan perbaikan tata kelola BUMN.

Penilaian penerapan GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan kriteria dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Asesmen GCG dilakukan melalui penilaian atas 572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil asesmen berupa skor GCG, sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik. Indikator persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMN.

Target kinerja Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2022 sebanyak 1 BUMN dengan tata kelola korporasi baik. Per Triwulan IV Tahun 2022 realisasi BUMN dengan kategori tata kelola korporasi "Baik"

sebanyak 1 BUMN yaitu Perusahaan Umum Jasa Tirta II dengan skor 83,61.

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100% (1/1).

BUMD dibentuk untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah. Aturan terkait perusahaan daerah bertujuan memastikan permodalan, sifat layanan, keleluasaan dalam mengelola aset dan organ kepengurusan terkait tata cara pengambilan keputusan. PP Nomor 54 Tahun 2017 mewajibkan BUMD menyesuaikan bentuk hukum menjadi perumda atau perseroda paling lambat sampai tahun 2017 dan mewajibkan penerapan “pengelolaan perusahaan yang baik” paling lambat tahun 2019.

BUMD dengan tata kelola korporasi baik adalah BUMD yang memiliki penerapan *corporate governance* dengan kategori “Baik”. Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD dengan tata kelola korporasi baik dibagi jumlah total BUMD.

Indikator ini belum pernah ditargetkan sebelumnya, dan mengingat pentingnya pembinaan tata kelola terhadap BUMD maka kegiatan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan tata kelola BUMD. Pada tahun pertama Renstra, kegiatan pembinaan lebih diarahkan pada sosialisasi dan bimtek tata kelola sehingga belum ditetapkan target. Target mulai ditetapkan untuk tahun 2021.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 13 BUMD dengan tata kelola korporasi baik dari populasi BUMD sebanyak 825 BUMD. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan *mapping* terhadap 493 BUMD dengan hasil 17 BUMD memiliki tata kelola “Baik”. Selain itu juga telah dilakukan *assessment* terhadap delapan BUMD, sosialisasi GCG kepada tiga BUMD, serta *monitoring* dan *Diagnostic Assessment* pada 5 BUMD.

5.2
Jumlah
BUMD
dengan tata
kelola
korporasi
baik

Dari kegiatan wasin tersebut, sebanyak 2 BUMD memiliki tata kelola korporasi “Baik” yaitu PUD Dharma Jaya dan PDAM Tirta Musi Kota Palembang.

Capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 2,06% (17/825) atau 130,76% (17/13) dari target 13 BUMD untuk Tahun 2022.

5.3 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Dalam rangka mencapai *return* yang tinggi dan sebagai salah satu tujuan pendiriannya maka BUMD harus memiliki tingkat kesehatan yang memadai.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BUMD. Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebesar 234 BUMD dengan kinerja sehat. Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 410 BUMD telah dilakukan evaluasi kinerja dengan hasil 250 BUMD memperoleh predikat “Sehat”. Sementara 108 BUMD atau 26,34% memperoleh predikat “Kurang Sehat” dan 52 BUMD atau 12,68% dengan predikat “Sakit”.

Capaian indikator kinerja ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar 106,83% (250/234) dari target Tahun.

5.4 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN tahun 2005 s.d. 2025, pembangunan diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik dasar antara lain Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, UU Nomor 44 Tahun 2009 mewajibkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) oleh seluruh Rumah Sakit Daerah.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Tujuan utama penerapan PPK BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Dengan menerapkan PPK BLUD, RSD diharapkan dapat beroperasi dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat dan lebih efisien, tanpa mengutamakan mencari keuntungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat. Salah satu cara untuk meyakinkan apakah tujuan penerapan PPK BLUD telah tercapai adalah dengan melakukan penilaian atas tata kelola/kinerja yang meliputi aspek keuangan dan non keuangan.

BLUD dengan kinerja “Sehat” adalah BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun asesor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”.

Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” dibagi jumlah total BLUD.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 78 BLUD.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 telah selesai dilakukan evaluasi kinerja terhadap 90 BLUD Kesehatan, dari jumlah yang tersebut sebanyak 83 BLUD RSUD berkinerja “Sehat” dan 7 BLUD RSUD berkinerja “Kurang Sehat”.

Target capaian BLUD berkinerja Sehat Tahun 2022 adalah sebanyak 78 BLUD. Dengan demikian realisasi BLUD dengan kinerja “Sehat” sebanyak 83 BLUD atau sebesar 106,41% (83/78) dari target tahun 2022.

5.5
Jumlah
Badan
Usaha Milik
Desa
(BUMDes)
yang
Mampu
Menyusun
Laporan
Keuangan

BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan adalah BUMDes yang dapat menyusun laporan keuangan setelah adanya kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dari BPKP.

Indikator Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan diukur berdasarkan hasil evaluasi atas keberhasilan BUMDes menyusun laporan keuangan setelah dilakukannya pembinaan dan pendampingan oleh BPKP.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 1.935 BUMDes.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 telah dilakukan kegiatan berupa asistensi, bimbingan teknis, pemetaan dan fasilitasi penerapan aplikasi Laporan Keuangan BUMDes terhadap 2.756 BUMDes atau 6,86% dari 40.187 BUMDes yang belum mampu menyusun laporan keuangan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan terus bertambahnya kemampuan BUM Desa menyusun laporan keuangan.

Capaian Kinerja BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan adalah sebanyak 2.492 BUMDes atau mencapai 128,78% dari target sebanyak 1.935 BUMDes.

5.6
Jumlah BUM
Desa yang
berkontribusi
kepada

Pendirian BUM Desa diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian desa. Untuk mencapai hal tersebut BPKP telah melakukan pengawasan terhadap pengembangan potensi desa. Potensi desa tersebut diharapkan dapat dikelola BUM Desa dalam rangka memberikan dampak peningkatan perekonomian di desa. Indikator Jumlah BUMDes yang mampu

perekonomian
desa

memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa diukur berdasarkan hasil evaluasi atas keberhasilan BUMDes menyusun laporan keuangan setelah dilakukannya pembinaan dan pendampingan oleh BPKP.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 272 BUMDes.

Capaian Kinerja BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan adalah sebanyak 272 BUMDes atau mencapai 264,07% dari target sebanyak 103 BUMDes.

6

Sasaran Strategis 6:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian *Intern* K/L/Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian *Intern* K/L/Badan Usaha, ditunjukkan dengan pencapaian 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3
2. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3
3. Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3
4. Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
5. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
6. Jumlah BLU/BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Uraian kinerja atas 6 indikator kinerja sastra 6 adalah sebagai berikut:

6.1
Jumlah
BUMN
dengan MRI \geq
Level 3

Manajemen Risiko (MR) adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan perusahaan. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan

manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki perusahaan, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan perusahaan.

Asesmen tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*Risk Management Maturity Level*) pada Badan Usaha (BUMN, BUMD, BLUD). Tujuannya untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Manajemen risiko indeks (MRI) dengan level Maturitas ≥ 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antaran lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Target kinerja Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2022 sebanyak 1 BUMN

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, terdapat 1 BUMN yaitu Perusahaan Jasa Tirta II dengan MRI \geq Level 3. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100% (1/1).

6.2
Jumlah
BUMD
dengan MRI \geq
Level 3

Manajemen risiko indeks (MRI) dengan level Maturitas ≥ 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antaran lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD, BPR, dan BPD yang dilakukan *assessment* maturitas dan *mapping* manajemen risiko dibagi dengan jumlah populasi BUMD, BPR dan

BPD. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Pengukuran indikator persentase badan usaha dengan MRI \geq Level 3 belum mengukur capaian atas maturitas manajemen risiko BUMD. Hal ini disebabkan karena hasil pengawasan yang dilakukan atas penerapan manajemen risiko BUMD belum mencerminkan nilai maturitas manajemen risiko. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko BUMD yang telah dilakukan meliputi pengukuran atas pemenuhan 10 infrastruktur dasar (Unit Pengelola Risiko, kebijakan MR, panduan penerapan MR, laporan internal audit penerapan MR, peta jalan penerapan MR, hasil evaluasi kebijakan dan pedoman MR, sosialisasi kebijakan dan pedoman MR, diklat/*workshop* MR, rencana kegiatan unit pengelola risiko, profil risiko tingkat korporat).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 329 BUMD.

Realisasi Kinerja MRI BUMD \geq Level 3 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 337 BUMD. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 102,43% (337/329) dari target tahun 2022.

6.3
Jumlah
BLUD dengan
MRI \geq Level 3

Manajemen risiko indeks (MRI) dengan level Maturitas \geq 3 menunjukkan bahwa MR BLUD, antaran lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BLUD yang dilakukan *assessment* maturitas dan *mapping* manajemen risiko dibagi dengan jumlah populasi BLUD yang ada. Capaian dihitung

secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Pengukuran indikator jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 belum mengukur capaian atas maturitas manajemen risiko BLUD. Hal ini disebabkan karena hasil pengawasan yang dilakukan atas penerapan manajemen risiko BLUD belum mencerminkan nilai maturitas manajemen risiko. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko BLUD yang telah dilakukan meliputi pengukuran atas pemenuhan 10 infrastruktur dasar (Unit Pengelola Risiko, kebijakan MR, panduan penerapan MR, laporan internal audit penerapan MR, peta jalan penerapan MR, hasil evaluasi kebijakan dan pedoman MR, sosialisasi kebijakan dan pedoman MR, diklat/*workshop* MR, rencana kegiatan unit pengelola risiko, profil risiko tingkat korporat).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 106 BLUD. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, terdapat 116 BLU/D dengan MRI \geq Level 3. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 109,43% (116/106).

6.4
Jumlah
BUMN
dengan
Kapabilitas
SPI \geq Level 3

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*. Standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan

Usaha Milik Negara, pasal 28 ayat (6) menyebutkan bahwa Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Evaluasi kualitas fungsi pengawasan intern tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, Sekretaris Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Nomor SK016/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan reviu (*assessment*) berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholders*-nya.

Peraturan di atas memperkuat opini mengenai penguatan fungsi audit internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja melalui manajemen penyelenggaraan korporasi yang sehat dan kuat. Hal ini disebabkan audit internal memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan korporasi serta mencegah dilakukannya Tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMN. Target kinerja Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada Tahun 2022 sebanyak 1 BUMN.

Per Triwulan IV Tahun 2022, belum dilakukan kegiatan penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN yaitu Perusahaan Umum

Jasa Tirta I. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100% (1/1).

6.5
Jumlah
BUMD
dengan
Kapabilitas
SPI \geq Level 3

Selain BUMN, BUMD juga dipandang perlu untuk memiliki SPI dengan kapabilitas yang mampu mendorong dan mengendalikan pengelolaan BUMD tersebut dalam mencapai tujuan usahanya. Sebagaimana kapabilitas SPI pada BUMN, kapabilitas SPI pada BUMD juga dinilai dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian *intern*.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMD dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMD.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 10 BUMD.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, capaian BUMD dengan kapabilitas SPI \geq 3 sebanyak 19 BUMD atau mencapai 172,27% dari target sebanyak 11 BUMD pada tahun 2022.

6.6
Jumlah BLU
dengan
Kapabilitas
SPI \geq Level 3

Selain BUMN/BUMD, BLU juga dipandang perlu untuk memiliki SPI dengan kapabilitas yang mampu mendorong dan mengendalikan pengelolaan BLU tersebut dalam mencapai tujuan usahanya. Sebagaimana kapabilitas SPI pada BUMN/BUMD, kapabilitas SPI pada BLU juga dinilai dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian *intern*.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BLU dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BLU.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2022 sebanyak 14 BLU.

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, capaian BLU dengan kapabilitas SPI ≥ 3 sebanyak 17 BLU/D atau mencapai 121,42% dari target sebanyak 14 BLU/D.

7

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara

Pencapaian Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan
2. Jumlah Layanan Eksternal yang dapat dijalankan menggunakan Teknologi Informasi

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 7 adalah sebagai berikut:

7.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan

Target indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa pada tahun 2022 adalah sebesar 75 (skala 1 s.d. 100). Realisasi indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan BLU, BLUD, BU Jasa Air, BUMD, dan BUM Desa sesuai hasil survei kepuasan *stakeholders* adalah 96,49. Capaian tahun 2022 atas indikator kualitas layanan eksternal adalah 128,65% (96,49%/75%).

7.2
Jumlah
Layanan
Eksternal
yang dapat
dijalankan
menggunakan
Teknologi
Informasi

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa berperan dalam peningkatan GRC BUMN, BLU, BLUD, dan BUMD. Seiring perkembangan zaman maka GRC Badan Usaha tersebut dapat dipermudah dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi-aplikasi. Untuk itu diperlukan upaya BPKP dalam memberikan nilai tambah berupa penyediaan aplikasi yang berguna bagi badan usaha. Target layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2022 sebanyak 1 buah.

Capaian kinerja tahun 2022 Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa sebesar 200% berupa aplikasi SIA BUM Desa dan FORSA BLUD dari target 1 buah layanan eksternal berbasis TI (2/1).

8

Sasaran Strategis 8:

Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara

Pencapaian Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase efektivitas Pengendalian *Intern* Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)
2. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 8 adalah sebagai berikut:

8.1
Persentase
efektivitas
Pengendalian

Target indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2021 adalah 70%.

**Intern Unit Kerja
(SPIP Unit Kerja)**

Pengendalian *intern* efektif jika hasil analisis atas risiko inheren dapat menurunkan tingkat risiko sampai pada tingkat risiko yang dapat diterima atau berada di bawah selera risiko. Realisasi tahun 2022, terdapat 41 risiko atau % dari 41 risiko yang teridentifikasi telah termitigasi. Dengan demikian, capaian Indikator Kinerja 8.1 persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) adalah 142,85% (100%/70%). Pada tahun 2021, tidak dilakukan penilaian indikator efektivitas SPIP Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa, sehingga tidak dapat dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022.

**8.2
Persentase
Penyelesaian
RTP (MRI Unit
Kerja)**

Indikator kinerja ketiga untuk mengukur capaian sasaran program 7.2 yaitu persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI Unit Kerja).

Target indikator kinerja ini adalah 100%, seluruh RT telah dilaksanakan. Realisasi tahun 2022, seluruh RT (100%) telah direalisasikan. Dengan demikian capaian Indikator kinerja ini sebesar 100%.

Capaian Output Tahun 2022

Realisasi output Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa tahun 2022 berdasarkan realisasi RKA-K/L Tahun 2022 adalah sebesar 144 laporan. Untuk menyelesaikan output tersebut, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa menggunakan SDM sebanyak 27 Orang.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi keuangan Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp1.969.574.904,00 atau 99,68% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.975.855.000,00.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Realisasi anggaran yang sebesar 99,68% ini dapat mendukung pencapaian target kinerja program tahun 2022 sebesar 110,80%. Efisiensi ini dapat tercapai karena beberapa faktor, antara lain: terdapat perubahan metode pengawasan, yaitu dari yang sebelumnya dilakukan dengan tatap muka langsung dengan mitra kerja berubah menjadi melalui media komunikasi dan penggunaan aplikasi sehingga dapat mengurangi biaya pengawasan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Laporan kinerja Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa menetapkan enam sasaran program. Keenam sasaran program tersebut mendukung tiga sasaran strategis BPKP.

Secara keseluruhan, target sasaran strategis tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa telah tercapai melebihi target, yaitu rata-rata 122,37%. Capaian sasaran strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas keuangan negara dan daerah 100,00%, Capaian sasaran strategis 2: meningkatnya akuntabilitas pembangunan nasional kategori baik 100,00%, Capaian sasaran strategis 5: meningkatnya kualitas pengendalian intern pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha 109,43%.

Target sasaran program tahun 2022 yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Akuntan Negara telah tercapai melebihi target, yaitu rata-rata sebesar 110,80%. Rata-rata capaian program 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan fiskal badan usaha terhadap keuangan negara dan daerah adalah sebesar 100,00%. Rata-rata capaian sasaran program 2: Meningkatnya pengawasan pembangunan atas dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional adalah sebesar 100,00%. Rata-rata capaian Sasaran Program 3: Meningkatnya akuntabilitas badan usaha sebesar 100,00% Rata-rata capaian sasaran program 4: meningkatnya kepatuhan dan efektivitas Operasional Badan UsahaBUMN adalah sebesar 100,00%. Rata-rata capaian sasaran program 5: meningkatnya kualitas tata kelola BUMN/D/BLUD adalah sebesar 134,76%, Rata-rata capaian sasaran program 6 (meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Badan Usaha)

adalah sebesar 117,42%, rata-rata capaian sasaran program 7: Meningkatnya kualitas tata kelola Deputi Akuntan Negara sebesar 164,32%, dan rata-rata capaian sasaran program 8: Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara sebesar 121,42%.

Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa dapat mencapai target tahun 2022 karena beberapa faktor. Pertama, sinergi antar Direktorat untuk menyelesaikan target. Kedua, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa menyusun pedoman pengawasan untuk menjadi panduan kegiatan pengawasan baik di pusat maupun di perwakilan dan untuk menjaga standar mutu pengawasan. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan. Keempat, mengembangkan dan menggunakan aplikasi dalam pengawasan guna mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa. Pertama, kompetensi SDM yang tidak merata. Kompetensi SDM terkait pengawasan di Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target tahun 2023, baik kompetensi dalam substansi maupun kompetensi terkait teknologi informasi. Kedua, sarana dan prasarana yang belum memadai. Beberapa penugasan pengawasan di Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa melibatkan database dalam jumlah yang besar sehingga diperlukan sarana yang memadai untuk melakukan pengolahan data.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa menetapkan rencana tindak pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan pengawasan tahun 2023 dengan memperhatikan dan memprioritaskan kegiatan pengawasan untuk mencapai target kinerja tahun 2023.
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan kualitas pengendalian *intern* dan tata kelola, antara lain: GCG, manajemen risiko dan kapabilitas satuan pengawas intern badan usaha.
3. Melakukan pengawasan terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BLU, BLUD, BUMN, dan BUMD dalam menyelenggarakan operasi perusahaan dalam mendukung pembangunan Daerah.
4. Memfokuskan pengawasan pada BLU, BLUD, BUMN, dan BUMD melalui kegiatan assurance dan consulting untuk mendorong tata kelola dan peningkatan kinerja.
5. Mengembangkan metode pengawasan berbasis Teknologi Informasi (*database* dan aplikasi).
6. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholders BPKP, khususnya Direktorat Pengawasan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa, untuk memperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Berdasarkan analisis capaian kinerja, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sehingga dapat diambil strategi dan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja dan meminimalkan risiko yang ada.